

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Rahman, H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jimly Asshiddiqie. 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie. 2006. *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*. Jurnal Konstitusi.

Kusnardi dan Harmily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: CV Cahaya Bakti.

Mahfud MD. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Septi Nur Wijayanti dan Iwan Satriawan. 2009. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Muhammadiyah Yogyakarta.

Siswanto Sunarno. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinargrafika.

Sudikno Mertokusumo. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten,
dan Kota

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun
2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Padang

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun
2015 tentang Kode Etik

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun
2015 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Padang

C. Putusan-Putusan Hakim

Putusan Nomor 17/G/2016/PTUN-PDG

Putusan Nomor 44/B/2017/PT.TUN-MEDAN

Putusan Nomor 11/G/2017.PTUN-PDG

Putusan Nomor 4/B/2018/PTTUN-MDN

Putusan Nomor 353/K/TUN/2018

D. Skripsi, Jurnal, dan Website

Shilda Octavia Rosa.2012.*Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kebijakan Kepala Daerah Periode 2009 sampai dengan sekarang. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.*

Rida Farida, *Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat.* Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2 Desember 2013. ISSN: 2356-1440

Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016: 35-52, Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal, Tri Cahya Indra Permana, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/11402/MjYxNjU>

<https://sumbar.antaraneews.com/berita/205373/erisman-diberhentikan-sebagai-ketua-dprd-padang>

<https://hariansinggalang.co.id/ini-penyebab-erisman-diberhentikan-bk-sebagai-ketua-dprd-padang/>

<https://news.okezone.com/read/2016/07/12/340/1436079/diberhentikan-dari-jabatan-ketua-dprd-padang-kirim-surat-klarifikasi>

<https://www.gosumbar.com/berita/baca/2016/07/02/kuasa-hukum-erisman-putusan-bk-dprd-padang-cacat-hukum-dan-tidak-bisa-dieksekusi/>

<https://www.harianhaluan.com/news/detail/65274/sidang-paripurna-kota-padang-erisman-diberhentikan-dari-ketua>

<https://www.harianhaluan.com/news/detail/69380/lawan-erisman-gubernur-kasasi>

E. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA Tahun 2014

